

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut dan jumlah pulau yang besar. Panjang pantai Indonesia mencapai 95.181 km dengan luas wilayah laut 5,4 juta km², mendominasi total luas teritorial Indonesia sebesar 7,1 juta km². Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber daya kelautan yang besar termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan terbesar (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 06/Men/2010). Keadaan ini menyebabkan kawasan pesisir menjadi sumber andalan pendapatan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu minimnya pengetahuan masyarakat pesisir untuk mengolah sumber daya yang ada menjadi hal yang perlu diatasi oleh pemerintah, karena seharusnya wilayah pesisir yang memiliki sumber daya yang sangat besar harus dapat diolah sendiri guna menambah pendapatan masyarakat.

Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut hal ini tercantum dalam UU No. 32 pasal 18 ayat 1. Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
- b. pengaturan administratif;
- c. pengaturan tata ruang;
- d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
- e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
- f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Penguasaan potensi kelautan menjadi kegiatan ekonomi yang perlu didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu memberikan sumbangan besar terhadap pendapatan sehingga kesejahteraan akan naik dan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Apabila tingkat kesejahteraan rendah pertumbuhan ekonomi pun akan terganggu karena pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses berkembangnya perekonomian suatu negara maka dari itu pertumbuhan ini sangat penting karena merupakan suatu proses untuk menjadikan suatu negara lebih maju dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Fadila, 2012).

Namun pada kenyataannya keadaan masyarakat pesisir di Indonesia pada saat ini masih sangat memprihatinkan. Masyarakat pesisir yang umumnya bermatapencarian sebagai nelayan masih banyak yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak. Permasalahan yang umumnya terjadi pada nelayan adalah pertama, kondisi cuaca di Indonesia seperti curah hujan tinggi dan ombak besar disertai angin kencang membuat para nelayan di pesisir enggan untuk melaut, sehingga di saat kondisi cuaca buruk para nelayan tidak memperoleh pendapatan. Kedua, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi

akhir-akhir ini juga akan berdampak pada pendapatan nelayan terutama nelayan yang menggunakan perahu yang berbahan bakar BBM. Harga BBM yang naik akan menambah pengeluaran mereka karena dengan naiknya harga BBM maka mereka akan mengeluarkan uang yang lebih tinggi untuk biaya bahan bakar perahu. Dengan naiknya harga BBM maka harga bahan kebutuhan lainnya juga ikut naik, hal ini semakin menyulitkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masalah ketiga adalah masih rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia termasuk tingkat pendidikan yang ditempuh oleh para nelayan juga menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan mereka.

Pemerintah memiliki peran yang besar dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan. Dengan menangani masalah kemiskinan berarti pemerintah dituntut untuk menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Saat ini kebijakan yang memihak rakyat miskin adalah kebijakan *pro poor*. Kebijakan *pro poor* menjadi salah satu konsep pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara khususnya negara sedang berkembang. Salah satu dari kebijakan dari kebijakan *pro poor* yang memihak orang miskin adalah kebijakan anggaran (*pro poor budget*).

Kebijakan anggaran (*pro poor budget*) adalah proses anggaran mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan di desain untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin. Keberpihakan ini tercermin dalam kebijakan program serta proyek-proyek yang disusun dan dilaksanakan (Anas, 2013).

Kebijakan anggaran (*pro poor budget*) diawali dengan kebijakan umum yang memihak pada orang miskin (*pro poor policy*), *pro poor institutions* (adanya

institusi-institusi khususnya institusi pemerintah yang memihak orang miskin), dan yang lebih penting lagi adalah adanya *pro poor government* (pemerintahan yang memihak orang miskin), tanpa adanya kebijakan seperti ini, sulit mengharapkan pemerintah untuk mempunyai kebijakan anggaran yang bersifat *pro poor* (Sulton Mawardi dan Sudarno Sumarto, 2003: 4).

Sejak pertengahan abad ke-14 dunia mulai menaruh masalah-masalah bidang kesejahteraan sosial yang selama itu ditangani oleh Rohaniawan. Bersamaan dengan itu Inggris dilanda masalah Black Death, wabah penyakit pes yang melanda dan membunuh beribu-ribu penduduk Inggris dan berakibat terhadap pengurangan tenaga kerja sampai pada akhirnya Raja Edward III mengeluarkan Statute Laborer di tahun 1349. Mulai saat itu, berakhirilah dominasi keagamaan dalam mengurus masalah-masalah kesejahteraan sosial yang dilatarbelakangi oleh pendekatan charities dan filantropis. Tahun-tahun kemudian, perhatian terhadap masalah-masalah kesejahteraan sosial terus ditingkatkan dan pada tahun 1531 Raja Hendry VIII membuat peraturan Statute of 1536 yaitu peraturan pengawasan terhadap fakir miskin. Kemudian pada tahun 1601 Ratu Elizabeth mengeluarkan undang-undang tentang kemiskinan yang populer dengan The Elizabeth Poor Law of 1601. Setelah revolusi industri, usaha-usaha di bidang kesejahteraan sosial mulai dikenal di luar Inggris terutama di Amerika. Di negara ini kemudian usaha-usaha kesejahteraan sosial berkembang pesat dan seakan-akan memasuki babak baru dalam bidang ini. Karena itu di kemudian hari orang lebih mengenal Amerika sebagai pusat kajian di bidang kesejahteraan sosial.

Bangsa Indonesia sejak lama telah mengenal konsepsi kesejahteraan sosial. Secara lebih jelas cita-cita bangsa Indonesia tentang kesejahteraan sosial dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila dan dijabarkan dalam Batang Tubuh UUD 1945. Di Indonesia usaha-usaha di bidang kesejahteraan sosial mulai di kenal dalam konsepsi modern setelah Indonesia dijajah Belanda. Pada waktu itu Belanda memperkenalkan beberapa program kesejahteraan sosial melalui missionaris dan gereja. Walaupun terasa baru namun bagi bangsa Indonesia yang sebelumnya telah memiliki pandang kesejahteraan sosial yang dilandasi oleh nilai-nilai religius termasuk didalamnya nilai-nilai humanistik, merasa pengenalan tersebut bukanlah suatu surprise namun hanya sebagai reaktualisasi terhadap nilai-nilai kesejahteraan sosial yang selama ini dianut (Laely Widjajati, 2011).

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (PP No. 39 th 2012 pasal 1 ayat 1). Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (PP No. 39 th 2012 pasal 1 ayat 2).

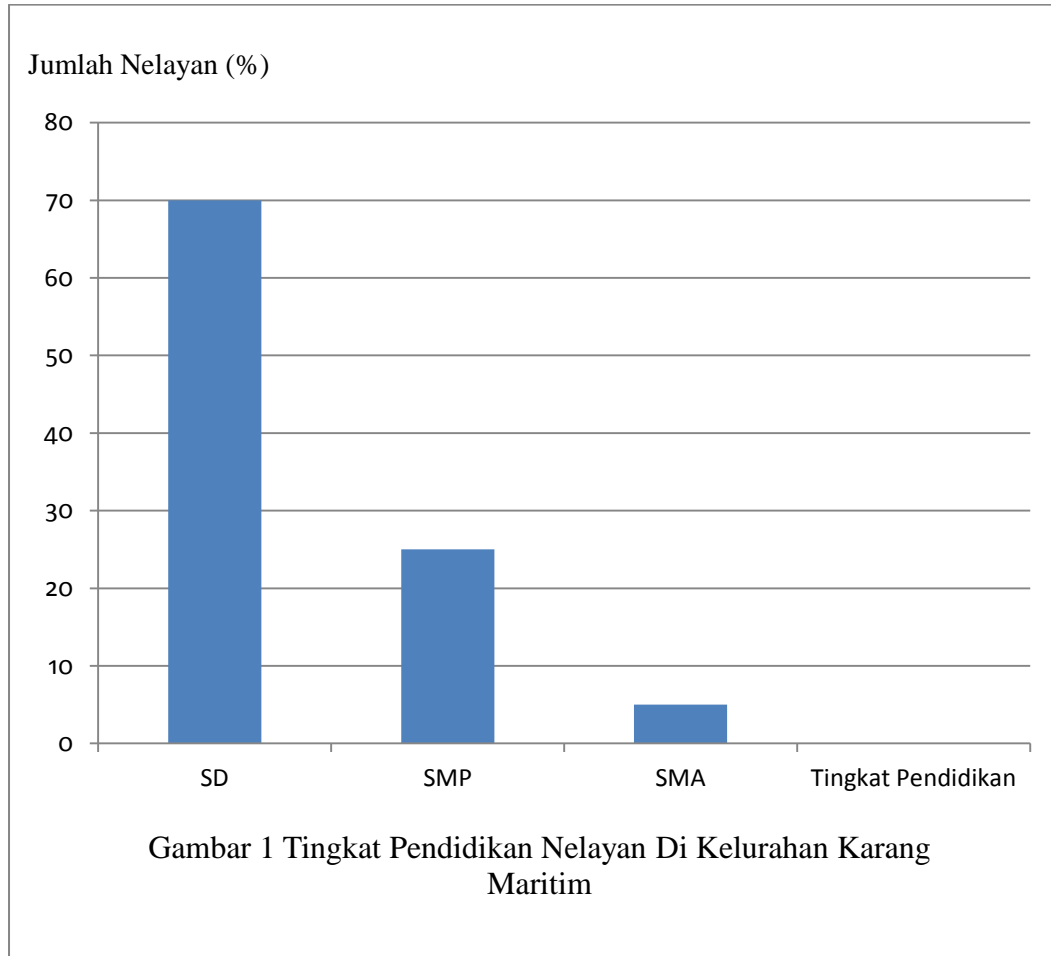
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:

- a. perseorangan
- b. keluarga
- c. kelompok
- d. masyarakat

(PP No. 39 th 2012 pasal 2 ayat 1)

Masyarakat nelayan pada umumnya masih termasuk kedalam masyarakat yang dikategorikan sederhana dengan kegiatan ekonomi yang bersifat subsisten yang ditandai dengan berbagai kelemahan, yaitu: (1) kondisi permodalan yang serba minim, (2) usaha yang bersifat tradisional, (3) tanggung jawab yang cukup tinggi, (4) banyak yang terjebak hutang, akibatnya taraf hidup mereka rata-rata rendah dibandingkan dengan golongan lainnya (Suhana, 2010). Salah satu kecamatan yaitu Kecamatan Panjang yang terletak di Kota Bandar Lampung memiliki wilayah pesisir yang dihuni oleh nelayan tradisional. 4 dari 8 kelurahan yang ada di Kecamatan Panjang memiliki penduduk yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Salah satu kelurahan yang memiliki penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan adalah Kelurahan Karang Maritim. Di kelurahan ini terdapat 180 orang nelayan tangkap yang telah dibagi menjadi 18 kelompok dan tiap kelompok terdiri dari 10 orang nelayan.

Masalah yang terdapat pada kehidupan nelayan di Kelurahan Karang Maritim diantaranya Pertama, rendahnya tingkat pendidikan sehingga kurang terangkatnya potensi masyarakat. Tingkat pendidikan yang ditempuh oleh nelayan di Kelurahan Karang Maritim dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber: Ketua Nelayan Kelurahan Karang Maritim

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat semakin baik kualitas sumber dayanya (BPS, 2013:32). Namun pada kenyataannya tingkat pendidikan yang ditempuh oleh para nelayan di Kelurahan Karang Maritim masih rendah, hal ini dapat dilihat pada Gambar 1. Dalam gambar 1 pendidikan terbesar yang ditempuh nelayan adalah Sekolah Dasar (SD) yaitu sebesar 70% atau sekitar 126 orang. Sedangkan 25% dari nelayan atau sekitar 45 orang menempuh pendidikan hingga Sekolah Menengah

Pertama (SMP). Sisanya sebesar 5% dari nelayan atau sekitar 9 orang menempuh pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kedua, minimnya pengetahuan teknologi untuk menunjang pekerjaannya. Ketiga, tidak adanya dana permodalan sehingga masalah yang muncul adalah tidak semua nelayan memiliki perahu untuk melaut. Jumlah nelayan yang memiliki perahu dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 Jumlah Kepemilikan Perahu Di Kelurahan Karang Maritim

| No | Jenis Perahu | Jumlah |
|----|-----------------------|-----------|
| 1 | Perahu besar | 31 orang |
| 2 | Perahu kecil | 20 orang |
| 3 | Tidak memiliki perahu | 129 orang |
| | Jumlah | 180 orang |

Sumber: Ketua RT 13 Kelurahan Karang Maritim

Dalam Tabel 1 jumlah seluruh nelayan di Kelurahan Karang Maritim sebanyak 180 orang. Dari 180 orang tersebut hanya 51 orang yang memiliki perahu secara pribadi yaitu 31 orang memiliki perahu besar, 20 orang memiliki perahu kecil, dan sisanya sebanyak 129 orang tidak memiliki perahu. Para nelayan yang tidak memiliki perahu biasanya akan menyewa perahu dan untuk bahan bakar perahu itu sendiri adalah BBM. Naiknya harga BBM membuat para nelayan semakin terbebani karena dengan naiknya harga BBM nelayan akan mengeluarkan uang yang lebih tinggi untuk bahan bakar ditambah lagi dengan pengeluaran untuk menyewa perahu akan semakin menurunkan pendapatan mereka.

Dalam masalah ini pemerintah telah membantu para nelayan untuk memberikan bantuan berupa pemberian mesin perahu, yaitu mesin besar untuk perahu yang berukuran besar dan dengan jarak melaut jauh, dan juga mesin kecil untuk perahu

yang berukuran kecil dan dengan jarak melaut dekat. Pemberian jaring ikan pun telah diberikan oleh nelayan, mesin dan jaring ikan ini diberikan kepada kelompok-kelompok nelayan. Bantuan ini membantu nelayan karena dengan adanya pemberian ini nelayan dapat menghemat pengeluaran untuk peralatan melaut. Tetapi pemberian ini masih belum cukup karena dengan kondisi anggota kelompok yang cukup banyak yaitu 10 orang. Sedangkan bantuan yang diberikan pemerintah hanya bisa digunakan 3 - 4 orang.

Masalah ke empat yang ada di Kelurahan Karang Maritim adalah tidak adanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sehingga hal ini menyebabkan sulitnya memasarkan hasil tangkapan mereka. Hal tersebut membuat para nelayan terpaksa menjual hasil tangkapan mereka dengan harga rendah. Masalah-masalah tersebut akan berdampak pada rendahnya pendapatan yang diperoleh nelayan, sehingga nelayan akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat Nelayan di Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dengan menggunakan indikator keluarga sejahtera berdasarkan BPS.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini merupakan gambaran tentang bagaimana kondisi kesejahteraan para nelayan khususnya di Kelurahan Karang Maritim. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya para nelayan.

2. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman serta dapat memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi khususnya tentang kesejahteraan masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Pola pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi

pendapatan maka proporsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Dengan demikian, pola pendapatan dan pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan (BPS, 2013: 46).

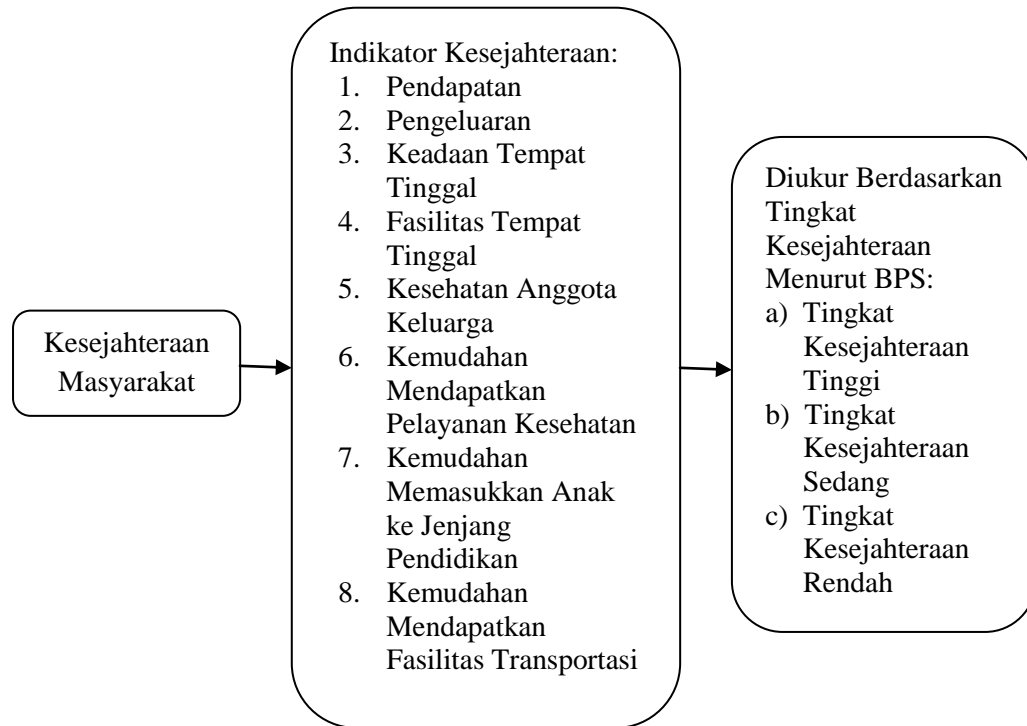
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 28 H Amandemen UUD 1945, bahwa rumah adalah salah satu hak dasar rakyat dan oleh karena itu setiap warga negara berhak bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun sayangnya hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan yang relatif masih besar. Hal tersebut terjadi antara lain karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya. Secara umum, kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Selain kualitas rumah tinggal, fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari juga mencerminkan tingkat kesejahteraan. Keadaan dan kualitas serta fasilitas lingkungan perumahan memberikan sumbangan dalam kenyamanan hidup sehari-hari. Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan tersebut diantaranya dapat terlihat dari luas lantai rumah, sumber air minum, sumber penerangan dan fasilitas tempat buang

air besar. Rumah dikatakan layak sebagai bangunan tempat tinggal apabila rumah tersebut telah memiliki dinding, atap dan lantai. Disamping itu kualitas dari ketiga unsur tersebut juga dapat menunjukkan keadaan sosial ekonomi penghuninya (BPS, 2013: 51).

Kesehatan dan gizi merupakan bagian dari indikator kesejahteraan penduduk dalam hal kualitas fisik (BPS, 2013: 13). Berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sudah banyak dilakukan oleh pemerintah saat ini. Diantaranya dengan memberikan penyuluhan kesehatan agar semua anggota keluarga berperilaku hidup sehat, penyediaan berbagai fasilitas umum seperti puskesmas, puskesmas rawat inap, puskesmas, posyandu serta penyediaan air bersih (BPS, 2013: 21)

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa melalui pendidikan seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945. Pendidikan menjadi sangat penting bagi suatu bangsa karena menjadi salah satu investasi bagi pembangunan dalam menentukan kualitas suatu bangsa. Selain itu pendidikan memiliki peranan strategis sebagai motor penggerak kemajuan pembangunan. Melalui pendidikan, beragam jenis teknologi dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan penduduk. Sehingga pemerintah selalu megupayakan program-program peningkatan kualitas pendidikan seperti peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, program biaya sekolah dan berbagai program beasiswa (BPS, 2013: 25).

Dari penjelasan-penjelasan tersebut terlihat jelas bahwa pendapatan, pengeluaran, perumahan, dan pendidikan akan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2 Bagan Kerangka Pemikiran

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bagian yaitu:

I PENDAHULUAN

Yang terdiri atas latar belakang, permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini berisi uraian tentang landasan teori dan bahasan - bahasan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian.

III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini berisi uraian tentang jenis dan sumber data berikut dengan teknik pengumpulan data, batasan penelitian, populasi dan sampel, alat analisis, uji persyaratan instrumen, dan gambaran umum mengenai kelurahan Karang Maritim.

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi uraian tentang hasil yang diperoleh dalam penelitian dan pembahasannya yang meliputi deskripsi tentang keadaan nelayan, analisis data kuantitatif serta pembahasannya.

V KESIMPULAN DAN SARAN

Terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN